



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI

(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI;

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 21 (dua puluh satu)
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Dengan	:	Menteri Hak Asasi Manusia RI, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Menteri Sekretaris Negara RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Jenderal DPD RI, dan Sekretaris Jenderal MPR RI
Hari, tanggal	:	Senin, 15 September 2025
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Lt.3 Gedung Nusantara II
Acara	:	Penetapan Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun 2026 Mitra Kerja Komisi XIII DPR RI hasil Pembahasan Badan Anggaran.
Ketua Rapat	:	Hj. Dewi Asmara, SH., MH. (Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/ F.Partai Golkar)

Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	:	22 orang dari 42 orang Anggota
		Izin 20 orang Anggota
		Menteri Hak Asasi Manusia RI, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI, Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Jenderal DPD RI, dan Sekretaris Jenderal MPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan **Menteri dan Pimpinan Lembaga Mitra Kerja** Komisi XIII DPR RI, pada 15 September 2025 dengan agenda “Penyampaian Hasil Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 (Penyesuaian Hasil Pembahasan Badan Anggaran)” dibuka pada pukul 13.10 WIB, dan dipimpin oleh **Hj. Dewi Asmara, SH., MH.**, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Berdasarkan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2026 sesuai Hasil Pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, ditetapkan Pagu Anggaran Mitra Kerja Komisi XIII DPR RI, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BA	MITRA KOMISI XIII DPR RI	RAPBN 2026	APBN KESEPAKATAN
1	001	MPR RI	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 314.960.238.000 B. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp. 735.039.762.000	Rp. 1.050.000.000.000
2	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.599.412.635.000 B. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Rp. 9.974.829.000	Rp. 2.609.387.464.000

3	095	DPD	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 717.759.183.000 B. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp. 1.082.240.817.000	Rp. 1.800.000.000.000
4	113	BNPT	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 284.728.360.000 B. Program Penanggulangan Terorisme Rp. 1.435.049.128.000	Rp. 1.719.777.488.000
5	122	BPIP	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 151.142.022.000 B. Program Pembinaan Ideologi Pancasila Rp. 233.720.000.000	Rp. 384.862.022.000
6	123	LPSK	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 137.008.934.000 B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 122.213.277.000	Rp. 259.222.211.000
7	136	KEMENTERIAN HAM	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 483.051.287.000 B. Program Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 235.078.185.000	Rp. 718.129.472.000
8	137	KEMENTERIAN IMIPAS	A. Program Dukungan Manajemen Rp. 12.302.124.469.000 B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 5.777.350.112.000	Rp.18.079.474.581.000

2. Komisi XIII DPR RI menyetujui hasil pembahasan pagu anggaran Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi XIII DPR RI Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Pagu Anggaran 2026, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah sebagai bagian dari proses penetapan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026
3. Komisi XIII DPR RI menganggap perlu adanya pendalaman lebih lanjut bersama Eselon I Kementerian/Lembaga terkait sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI guna memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional, sekaligus menjamin efektivitas alokasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2026.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.00 WIB

Jakarta, 15 September 2025

KETUA RAPAT

TTD

HJ. DEWI ASMARA, SH., MH.
A-299

MENTERI HAK ASASI MANUSIA RI

**a.n. MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN RI
WAKIL MENTERI,**

TTD

TTD

NATALIUS PIGAI, S.IP.

SILMY KARIM

**a.n. MENTERI SEKRETARIS NEGARA
WAKIL MENTERI,**

KETUA LPSK

TTD

JURI ARDIANTORO

Dr. ACHMADI, SH., M.A.P.
BRIGJEN POLISI (PUK)

~~KEPALA~~ BPIP

||KEPALA BNPT

TTD

TTD

Prof. Drs. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA.,
Ph.D.

EDDY HARTONO, S.I.K., M.H.
KOMJEN. POLISI

SEKJEN MPR RI

SEKJEN DPD RI

TTD

TTD

SITI FAUZIAH, S.E., M.M.

H. MOHAMMAD IQBAL, S.I.K., M.H.